

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru, Pemerintahan Indonesia berjalan secara sentralistik sehingga terjadi ketimpangan antar daerah yang sangat besar karena kekayaan daerah lebih banyak dikuasai oleh pusat. Ketergantungan antara pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat sangat tinggi sehingga tidak ada kemandirian bagi pengembangan daerah baik pemerintah maupun masyarakat daerah.

Kondisi sentralistik tersebut menghadapi pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakan desentralisasi. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki pemerintahan reformasi pada tahun 1997 dan berada di masa transformasi dalam hubungan antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Kebijakan otonomi yang lahir dari tuntutan berbagai daerah terhadap demokratisasi melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi maupun kabupaten diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus urusan rumah tanganya sendiri.

Setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan didaerahnya masih tertinggal, dan menginginkan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di

semua wilayah, sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan adanya aspirasi dari kalangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sudah muncul sejak tahun 1992 dan kembali bergulir setelah terjadi reformasi di Indonesia untuk memekarkan daerah dengan dasar pertimbangan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan luas daerah kabupaten sangat luas sehingga dianggap Pemerintah pusat akan kesulitan mencapai pemerataan pembangunan.

Melalui kerja keras perintis, dan pemrakarsa, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang akhirnya melahirkan kabupaten baru yakni Kabupaten Serdang Bedagai dengan dikeluarkan Undang- Undang No 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai bersamaan juga dengan pembentukan kabupaten Samosir.

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mengambil kebijakan dengan Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk maka pada tanggal 7 Januari 2003 kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang dibentuk dengan Nama Kabupaten Serdang Bedagai dengan ibukota Sei Rampah. Penetapan nama Serdang Bedagai juga tidak lepas dari sejarah dimana daerah ini dahulu berada dibawah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2003 – 2013 di Provinsi Sumatera Utara.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut :

1. Sejarah singkat kesultanan Serdang dan Bedagai
2. Kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sebelum pemekaran wilayah
3. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai
4. Proses pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai dari kabupaten Deli Serdang
5. Kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sesudah pemekaran wilayah
6. Kesejahteraan masyarakat daerah dibawah kekuasaan pemerintah daerah

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian masalah pada identifikasi masalah, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah yang terbatas pada :

1. Kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai dari Kabupaten Deli Serdang
2. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai
3. Proses pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai
4. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sesudah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sebelum pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Bagaimana proses terjadinya pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai?
4. Bagaimana kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sesudah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sebelum pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai
3. Untuk mengetahui proses terjadinya Kabupaten Serdang Bedagai
4. Untuk mengetahui kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sesudah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang

F. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai kondisi ekonomi, pendidikan, pertanian/ perkebunan dan infrastruktur Kabupaten Serdang Bedagai sebelum dan sesudah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebagai perbandingan bagi mahasiswa pendidikan sejarah maupun bagi jurusan lainnya dengan bidang penelitian yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang sempurna.
3. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat di dalam pengetahuan mengenai perkembangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang.